

Kode	IN.26/SPMI/07/02/2018
Tanggal Revisi	15 Januari 2018
Tanggal Berlaku	7 Februari 2018
Revisi	Ke-1
Disahkan oleh	Rektor

SOP BAGIAN PERENCANAAN

Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
1.	1.
2.	
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
1.	1. Komputer, Printer dan Mesin foto copy
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan
1.	Arsip

1. PENYUSUNAN RKAKL DAN DIPA IAIN BUKITTINGGI

NO.	URAIAN KEGIATAN
1	Menerima usulan anggaran dari Fakultas/pascasarjana/lembaga dan unit
2	Menginput, menyusun, dan memproses usulan dari fakultas/lembaga dan unit
3	Mengkoreksi dan menyesuaikan anggaran yang diusulkan oleh fakultas/lembaga dan unit sesuai dengan Standar Biaya Masukan dan Standar Biaya Khusus
4	Mengajukan usulan anggaran IAIN Bukitinggi kepada Rektor
5	Usulan anggaran institut dikoreksi oleh Rektor
6	Membuat usulan akhir anggaran institut sesuai dengan koreksi dari rektor
7	Usulan anggaran Institut ditandatangani oleh rektor
8	Mengajukan usulan anggaran ke Bagian Perencanaan dirjen Pendis
9	Menerima DIPA yang telah disahkan oleh Kementerian Keuangan
10	Download dan Cetak DIPA/RKAKL IAIN Bukittinggi untuk diserahkan kepada pimpinan

2. PENYUSUNAN REVISI ANGGARAN DIPA

NO.	URAIAN KEGIATAN				
1	Menerima usulan revisi anggaran dari Fakultas/Unit yang di ketahui dan di setujui oleh KPA dan PPK				
2	Membuat usulan Revisi Anggaran Rencana Kerja Kementrian Lembaga (RKA-KL) dan Daftar Rincian Anggaran (DRA) dari eselon 1 (Jika ada)				
3	Membuat Matriks Revisi sebelum dan sesudah Revisi Anggaran, untuk disampaikan dan disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).				
4	Membuat surat permohonan Pengesahan Revisi DIPA Anggaran ke Kanwil DJPB/ke DJA dengan melampirkan matriks Revisi sebelum dan sesudah revisi tersebut.				
5	Mengirim data revisi beserta ADK ke email Kanwil DJPB/DJA				
6	Pembahasan revisi DIPA di Kanwil DJPB/DJA				
7	Persetujuan Revisi DIPA dari Kanwil DJPB/DJA setelah keluarnya surat penegsahan revisi DIPA oleh Kanwil DJPB/DJA				
8	Cetak Revisi DIPA melalui Aplikasi RKA-KL ditandatangani oleh KPA				
9	Transfer ADK revisi DIPA ke SPM dan perubahan data ke aplikasi saiba				
10	Pengarsipan Berkas Revisi DIPA				

Catatan : Dilaksanakan setiap ada perubahan anggaran dan atau adanya penambahan anggaran

3. PENYUSUNAN REVISI PETUNJUK OPERASIONAL KERJA (POK) DIPA

NO.	URAIAN KEGIATAN
1	Menerima usulan revisi anggaran dari Fakultas/Unit yang di ketahui dan di setujui oleh KPA dan PPK
1.	Membuat usulan Revisi POK Anggaran Rencana Kerja Kementrian Lembaga (RKA-KL)
2.	Membuat konsep Matriks Revisi sebelum dan sesudah Revisi Anggaran, untuk disampaikan dan ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) IAIN Bukittinggi
3.	Melakukan penginputan perubahan revisi POK pada aplikasi RKA-KL
4.	Cetak Revisi POK DIPA melalui Aplikasi RKA-KL dan ditandatangani oleh KPA
5.	Transfer ADK revisi POK DIPA ke SPM dan perubahan data ke aplikasi SAKPA
9.	Pengarsipan Berkas Revisi POK DIPA

Catatan: Dilaksanakan setiap ada anggaran yang tidak mencukupi atau perubahan kebutuhaan



SUBBAG KEUANGAN DAN BMN

Kode	IN.26/SPMI/07/02/2018
Tanggal Revisi	15 Januari 2018
Tanggal Berlaku	7 Februari 2018
Revisi	Ke-1
Disahkan oleh	Rektor

PENGARSIPAN DOKUMEN PENCAIRAN DAN DOKUMEN PELAPORAN

Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara; UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Keppres No.42 Tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan APBN Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1979 tentang penyusutan arsip; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. 	 Menguasi Akuntansi dan Manajemen pengelolaan keuangan Menguasai kegiatan perbendaharaan (pernah ikut diklat kebendaharaan) Pernah mengikuti diklat PPAKP Pernah dan menguasi diklat perpajakan Pernah mengikuti diklat SAI dan menguasai SAI Menguasai Aplikasi GPP Menguasai Aplikasi SISKA
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
 SOP Pencairan Anggaran; SOP Pengelolaan Keuangan. SOP Pencairan Gaji SOP Pencairan Uang Makan SOP Pencairan Tunjangan Profesi 	Meja, Kursi, Komputer, Printer, Mesin ketik manual, ATK.
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
 SPM sudah disetujui oleh KPPN; SP2D sudah diterbitkan oleh KPPN; Daftar sudah didistribusikan pada yang berhak; Kwitansi dan Faktur sudah di stempel dan di tanda tangani rekanan/ toko. Kwitansi sudah ditandatangani persetujuan bayar bendahara pengeluaran dan Pejabat Pembuat Komitmen. 	 SPM; SP2D; Rencana pengeluaran; RAB; TOR; Kwitansi; P etunjuk Operasional; F aktur;

		Pelaksana			IV.4.		
No	Kegiatan	Staf Keua ngan	Bend. Pengel	Syarat/ Perleng kapan	Waktu	Output	- Kete rangan
1	Menyiapkan, memilah, SP2D, SPM, kwitansi,faktur, daftar, berkas-berkas pencairan dana, berkas rekonsiliasi, berkas laporan dkk sesuai kegiatan masing-masing				3 hari	Berkas yang siap untuk diarsipkan	
2	Menyiapkan, memilah, SP2D, SPM, kwitansi,faktur, daftar, berkas-berkas pencairan dana, berkas rekonsiliasi, berkas laporan dkk sesuai kegiatan masing-masing				3 hari	Berkas yang siap untuk diarsipkan	
3	Menyiapkan ordener yang telah diberi keterangan	•			1 hari	Ordener yang siap dimasuki berkas yang sesuai	
4	Memasukkan dokumen atau berkas yang telah diverifikasi pada odner yang telah diberi label sesuai kegiatan masing- masing.			Dokumen kegiatan pencairan, pelaporan dst yang telah diverifikasi dan odner yang telah diberi label	1 hari	Dokumen yang telah masuk pada odner yang sesuai dengan label	
5	Memasukkan dan menata pada lemari Arsip.			Berkas yang telah dimasukkan odner yang sudah diberi label	1 hari	Tertatanya berkas yang telah terarsip dalam lemari arsip yang telah disediakan	



Kode	IN.26/SPMI/07/02/2018
Tanggal Revisi	15 Januari 2018
Tanggal Berlaku	7 Februari 2018
Revisi	Ke-1
Disahkan oleh	Rektor

SOP BEASISWA BIDIKMISI

Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
1.	1.
2.	
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
1.	
D : 4	B (
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan
1.	Arsip

1. TUJUAN

Prosedur ini bertujuan untuk membantu, mendorong, dan menunjang kelancaran proses belajar mahasiswa sehingga dapat menyelesaikan studinya tepat pada waktunya.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini digunakan dalam lingkup layanan bantuan biaya perkuliahan Bidikmisi bagi Mahasiswa INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI.

3. REFERENSI

- 3.1. Pedoman Mutu
- 3.2. Pedoman Pembinaan dan Layanan Bidang Kemahasiswaa
- 3.3. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3.5. Peraturan menteri Agama RI No 12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI

- 3.6. SK Menteri Agama RI No. ... Tahun tentang Statuta IAIN Bukittinggi
- 3.7. SK Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI No. Dj/253/2007 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Agama Islam:
- 3.8. SK Direktur Jenderal pendidikan Islam Departemen Agama RI No. Dj/255/2007 tentang Tata Tertib Mahasiswa Perguuruan Tinggi Agama Islam;
- 3.9. SK Rektor INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI No. ... Tahun tentang Kode Etik Mahasiswa INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI

4. DEFINISI

4.1. Beasiswa Bidik Misi adalah jenis beasiswa yang diberikan oelh INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI bagi para mahasiswa kurang/tidak mampu yang berprestasi baik Akademik maupun non akademik.

5. PENGGUNA

- 5.1. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
- 5.2. Kabiro AUAK
- 5.3. Kasubbag Administrasi dan Akademik
- 5.4. Kasubag Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama
- 5.5. Kabag Akademik dan Kemahasiswaan
- 5.6. Fakultas/Jurusan
- 5.7. Bagian Keuangan
- 5.8. Mahasiswa

6. KETENTUAN UMUM

- 6.1. Prinsip umum kerjasama:
 - 6.1.1. Beasiswa ini untuk siswa lulusan SMA/MA/SMK sederajat dua tahun terakhir tahun berjalan
 - 6.1.2. Beasiswa ini khusus untuk siswa lulusan SMA/MA/SMK sederajat yang berprestasi
 - 6.1.3. Calon mahasiswa harus lulus seleksi masuk ke UIN Sunan Ampel Surabaya
 - 6.1.4. Calon mahasiswa diwajibkan untuk memenuhi persyaratan yang diberlakukan

- 7.1. Uraian Prosedur Kegiatan
 - 7.1.1. Baca kembali pedoman Bidikmisi dan MOU
 - 7.1.2. Penentuan quota fakultas
 - 7.1.3. Kirim surat pemberitahuan ke fakultas-fakultas
 - 7.1.4. Lakukan seleksi di fakultas
 - 7.1.5. Laksanakan inputing data mahasiswa calon penerima Bidikmisi
 - 7.1.6. Cek rekening mahasiswa
 - 7.1.7. Buatkan Sk Rektor bagi penerima Bidikmisi
 - 7.1.8. Arsipkan bukti-bukti administrasi beasiswa

7.2. Bagan Alir/Flowchart Prosedur Kegiatan

		Pelaksana		Mutu Baku				
No	Kegiatan	Subbag ADM & Pemb	Fakul tas	Juru san	Keua ngan	Syarat/ Perleng kapan	Waktu	Output
1	Rapat pimpinan IAIN Bukittinggi untuk menentukan prosedur, syarat, dan quota					Daftar hadir dan notulen rapat		
2	Mengirim surat ke fakultas					Surat pemberita huan beasiswa	2 jam	Notulen beasiswa
3	Menentukan quota dan mengirim surat ke jurusan					Surat pemberita huan beasiswa	2 jam	Surat pemberita huan beasiswa
4	Menyeleksi calon penerima dan mengirim data ke fakultas					Berkas permohonan beasiswa	2 hari	Berkas permohonan beasiswa
5	Menginput data dan mengirim ke bagian kemahasiswaan					Daftar pemohon beasiswa	15 hari	Daftar pemohon beasiswa
6	Mengecek aktivasi rekening, kesesuaian daftar calon penerima dengan berkasnya, daftar nama ditanda tangani pejabat terkait dan mengirim daftar nama ke bagian keuangan					Kelengkapan administrasi	7 hari	Daftar penerima beasiswa per 200 mahasiswa
7	Mengirim daftar nama ke kantor KPPN Jakarta IV					Daftar penerima beasiswa	7 hari	Beasiswa diterima mahasiswa
8	Selesai (dikirim ke rekening mahasiswa)							

8. DOKUMEN/ARSIP TERKAIT

- 8.1. Pedoman Bidikmisi
- 8.2. MOU Kemendiknas dan INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI
- 8.3. Surat dari Kemendiknas
- 8.4. Surat dari bagian kemahasiswaan ke fakultas
- 8.5. Surat dari fakultas ke bagian kemahasiswaan
- 8.6. Berkas permohonan peserta Bidikmisi
- 8.7. SK Rektor tentang penerima Bidikmisi
- 8.8. SPJ Bidikmisi



Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal efektif	
Disahkan oleh	Rektor

SOP LAYANAN BEASISWA MISKIN

Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
1.	1. Mempunyai pengetahuan cukup tentang
2.	MoU
	2. Mempunyai pengetahuan tentang kelebihan
	dan kekurangan calon mitra kerja
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
2.	1. Komputer, Printer dan Mesin foto copy
Dowingstone	Depoststen den Dendetsen
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan
2.	Arsip

1. TUJUAN

Prosedur ini bertujuan untuk membantu, mendorong, dan menunjang kelancaran proses belajar mahasiswa sehingga dapat menyelesaikan studinya tepat pada waktunya.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini digunakan dalam lingkup Layanan Beasiswa bagi Mahasiswa Miskin dan Berprestasi INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI.

3. REFERENSI

- 3.1. Pedoman Mutu
- 3.2. Pedoman Pembinaan dan Layanan Bidang Kemahasiswaa
- 3.3. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3.5. Peraturan menteri Agama RI No 12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI

- 3.6. SK Menteri Agama RI No. ... Tahun tentang Statuta UIN Sunan Ampel Surabaya;
- 3.7. SK Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI No. Dj/253/2007 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Agama Islam:
- 3.8. SK Direktur Jenderal pendidikan Islam Departemen Agama RI No.Dj/255/2007 tentang Tata Tertib Mahasiswa Perguuruan Tinggi Agama Islam;
- 3.9. SK Rektor INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI No. ... Tahun tentang Kode Etik Mahasiswa INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI

4. **DEFINISI**

Layanan Beasiswa Miskin adalah sebuah layanan beasiswa yang diberikan oleh INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI bagi para mahasiswa miskin dan berprestasi.

5. PENGGUNA

- 5.1. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
- 5.2. Kabiro AAKK
- 5.3. Kasubbag Administrasai dan Pembinaan Mahasiswa
- 5.4. Kabag Kemahasiswaan dan Alumni
- 5.5. Fakultas/Jurusan
- 5.6. Bagian Keuangan
- 5.7. Mahasiswa

6. KETENTUAN UMUM

- 6.1. Prinsip umum kerjasama:
 - 6.1.1. Beasiswa ini untuk siswa lulusan SMA/MA/SMK sederajat
 - 6.1.2. Beasiswa ini khusus untuk siswa lulusan SMA/MA/SMK sederajat yang miskin dan berprestasi
 - 6.1.3. Calon mahasiswa diwajibkan untuk memenuhi persyaratan yang diberlakukan

- 7.1. Uraian Prosedur Kegiatan
 - 7.1.1. Adakan Rapat persiapan
 - 7.1.2. Kirim surat pemberitahuan ke fakultas-fakultas
 - 7.1.3. Lakukan seleksi di faklultas .
 - 7.1.4. Laksanakan seinputing data mahasiswa calon penerima beasiswwa
 - 7.1.5. Cek rekening mahasiswa
 - 7.1.6. Buatkan Sk Rektor bagi penerima Beasiswa
 - 7.1.7. Umumkan nama-nama penerima
 - 7.1.8. Arsipkan bukti-bukti administrasi beasiswa

7.2. Bagan Alir / Flowchart

1.2.	Bagan Anr / Flowchar	Pelaksana Mutu Baku									
No	Kegiatan	Rektor, Warek III, Biro AUAK	Bag. Kemaha siswaan	Fak.	Jur.	Keu	Syarat/ Perleng kapan	Wak tu	Output		
1	Rektor menyampaikan alokasi dana dan jumlah penerima beasiswa miskin dan berprestasi/DIPA										
2	Rapat pimpinan IAIN Bukittinggi untuk menentukan prosedur, syarat, dan Quota						Daftar Hadir Rapat dan Notula Rapat	2 jam	Notulen beasiswa		
3	Mengirim surat ke fakultas						Surat beritahuar Beasiswa	2 jam	Surat beritahuan Beasiswa		
4	Menentukan Quota dan mengirim surat ke jurusan						Surat beritahuar Beasiswa	2 hari	Surat beritahuan Beasiswa		
5	Menyeleksi calon penerima dan mengirim data ke fakultas						Berkas permohonan beasiswa	15 hari	Berkas permohonan beasiswa per 200 mahasiswa		
6	Menginput data dan mengirim ke bagian kemahasiswaan						Daftar pemohon beasiswa	7 hari	Daftar pemohon beasiswa		
7	Mengecek aktivasi rekening, kesesuaian daftar calon penerima dengan berkasnya, daftar nama ditanda tangani pejabat terkait dan mengirim daftar nama ke bagian keuangan						Kelengkapan administrasi	7 hari	Daftar penerima beasiswa per 200 mahasiswa		
8	Rektor menerbitkan SK Penetapan Penerima Beasiswa Miskin dan Berprestasi/DIPA	_									
9	Mengirim daftar nama ke kantor KPPN Jakarta IV						Daftar penerima beasiswa	7 hari	Beasiswa diterima mahasiswa		
10	Selesai (dikirim ke rekening mahasiswa)										

8. DOKUMEN / ARSIP TERKAIT

- 8.1. Surat dari bagian kemahasiswaan ke fakultas
- 8.2. Surat dari fakultas ke bagian kemahasiswaan
- 8.3. Surat keterangan tidak mampu
- 8.4. Surat keterangan aktif kuliah
- 8.5. IPK, KTM dan Rekening BRI
- 8.6. SK tentang penerima beasiswa
- 8.7. Arsip



Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal efektif	
Disahkan oleh	Rektor

SOP LAYANAN BEASISWA SUPERSEMAR

Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
1.	Mempunyai pengetahuan cukup tentang MoU Mempunyai pengetahuan tentang kelebihan dan kekurangan calon mitra kerja
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
1.	1. Komputer, Printer dan Mesin foto copy
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan
1.	Arsip

1. TUJUAN

Prosedur ini bertujuan untuk membantu, mendorong, dan menunjang kelancaran proses belajar mahasiswa sehingga dapat menyelesaikan studinya tepat pada waktunya.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini digunakan dalam lingkup Layanan Beasiswa Supersemar di INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI.

3. REFERENSI

- 3.1. Pedoman Mutu
- 3.2. Pedoman Pembinaan dan Layanan Bidang Kemahasiswaa

- 3.3. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3.5. Peraturan menteri Agama RI No 12 Tahun 2015 tentang Organisasidan Tata Kerja INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI
- 3.6. SK Menteri Agama RI No. ... Tahun tentang Statuta UIN Sunan Ampel Surabaya;
- 3.7. SK Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI No. Dj/253/2007 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Agama Islam;
- 3.8. SK Direktur Jenderal pendidikan Islam Departemen Agama RI No. Dj/255/2007 tentang Tata Tertib Mahasiswa Perguuruan Tinggi Agama Islam;
- 3.9. SK Rektor INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI No. ...
 Tahun tentang Kode Etik Mahasiswa INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 (IAIN) BUKITTINGGI

4. DEFINISI

Layanan Beasiswa Supersemar adalah sebuah layanan beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI.

5. PENGGUNA

- 5.1. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
- 5.2. Kabiro AAKK
- 5.3. Kasubbag Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama
- 5.4. Kabag Akademik dan Kemahasiswaan
- 5.5. Fakultas/Jurusan
- 5.6. Bagian Keuangan
- 5.7. Mahasiswa

6. KETENTUAN UMUM

- 6.1. Prinsip umum kerjasama:
 - 6.1.1. Beasiswa ini untuk siswa lulusan SMA/MA/SMK sederajat
 - 6.1.2. Beasiswa ini khusus untuk siswa lulusan SMA/MA/SMK sederajat yang miskin dan berprestasi
 - 6.1.3. Calon mahasiswa diwajibkan untuk memenuhi persyaratan yang diberlakukan

- 7.1. Uraian Prosedur Kegiatan
 - 7.1.1. Tindaklanjuti pemberitahuan beasiswa dari Supersemar
 - 7.1.2. Adakan Rapat untun mmenentukan quota masing-masing fakultas
 - 7.1.3. Kirim informasi ke Fakultas-fakultas
 - 7.1.4. Lakukan seleksi calon penerima beasiswa Supersemar dan umumkan hasil seleksinya
 - 7.1.5. Buatkan surat dan kirimkan ke Yayasan Supersemar
 - 7.1.6. Distribuisikan dana beasiswa Supersemar sesuai ketentuan Supersemar
 - 7.1.7. Arsipkan dokumen beasiswa Super Semar
- 7.2. Bagan Alir / Flowchart

			Po	elaksana			Mı	utu Bak	u
No	Kegiatan	BI	Warek, Biro	Bag Kema hasisw aan	Fak	Maha siswa	Syarat/ Perleng kapan	Wak tu	Output
1	Rektor/Warek III menerima surat dari Yayasan dan mendisposisi ke Bagian Kemahasiswaan								
2	Mengirim surat alokasi beasiswa ke IAIN Bukittinggi		-				Surat alokasi beasiswa	1 hari	Alokasi beasiswa supersemar
3	Mengirim Surat Bantuan Beasiswa Supersemar ke fakultas			—			Surat Bantuan Beasiswa Supersem ar	1 hari	Surat Bantuan Beasiswa Supersem ar
4	Menentukan Quota dan mengirim surat ke jurusan						Surat permohonan calon penerima beasiswa & quotanya	1 hari	Quota calon penerima beasiswa
5	Menyeleksi data penerima dan mengirim data ke fakultas					+	Berkas pengajuan beasiswa	2 hari	Data calon penerima beasiswa
6	Menginput data penerima dan mengirim data ke bagian kemahasiswaan						Berkas calon penerima beasiswa	2 hari	Data calon penerima beasiswa
7	Membuat Surat Keputusan tentang penerima beasiswa Yayasan Supersemar		4						
8	Mengirim surat dan daftar nama penerima ke yayasan Supersemar		•				Daftarnama penerima beasiswa	2 hari	Daftar penerima beasiswa
9	Mentransfer dana ke rekening dinas IAIN Bukittinggi						Bukti transfer dana beasiswa	1 hari	Dana beasiswa
10	Mencairkan dananya ke penerima dan melaporkan surat pertanggungjawa bkan ke IAIN Bukittinggi dan Yayasan Supersemar		*				Bukti tanda dana beasiswa supersemar dan LPJ dikoordinir IAIN Bukittinggi	20 hari	Bantuan beasiswa diterima mahasiswa

8. DOKUMEN/ARSIP TERKAIT

- 8.1. Surat dari Yayasan Supersemar
- 8.2. Surat dari bagian kemahasiswaan ke fakultas
- 8.3. Surat pengajuan permohonan beasiswa supersemar dari fakultas
- 8.4. Surat Keterangan Aktif Kuliah
- 8.5. IPK
- 8.6. KTM
- 8.7. Daftar penerima beasiswa dari IAIN
- 8.8. SPJ penerima beasiswa supersemar



Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal efektif	
Disahkan oleh	

SOP LAYANAN BEASISWA UMUM

Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
	Mempunyai pengetahuan cukup tentang MoU
	3. Mempunyai pengetahuan tentang kelebihan dan kekurangan calon mitra kerja
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
	Komputer, Printer dan Mesin foto copy 2.
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan
	Arsip

1. TUJUAN

Prosedur ini bertujuan untuk membantu, mendorong, dan menunjang kelancaran proses belajar mahasiswa sehingga dapat menyelesaikan studinya tepat pada waktunya.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini digunakan dalam lingkup Layanan Beasiswa bagi mahasiswa INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI.

3. REFERENSI

- 3.1. Pedoman Mutu
- 3.2. Pedoman Pembinaan dan Layanan Bidang Kemahasiswaa
- 3.3. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan

- Tinggi;
- 3.5. Peraturan menteri Agama RI No 12 Tahun 2015 tentang Organisasidan Tata Kerja INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI
- 3.6. SK Menteri Agama RI No. ... Tahun tentang Statuta IAIN Bukittinggi
- 3.7. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI No. Dj/253/2007 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Agama Islam;
- 3.8. SK Direktur Jenderal pendidikan Islam Departemen Agama RI No. Dj/255/2007 tentang Tata Tertib Mahasiswa Perguuruan Tinggi Agama Islam;
- 3.9. SK Rektor INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI No. ...
 Tahun tentang Kode Etik Mahasiswa INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 (IAIN) BUKITTINGGI

4. DEFINISI

Layanan Beasiswa Umum adalah sebuah layanan beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI.

5. PENGGUNA

- 5.1. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
- 5.2. Kabiro AAKK
- 5.3. Kasubbag Administrasai dan Pembinaan Mahasiswa
- 5.4. Kabag Kemahasiswaan dan Alumni
- 5.5. Fakultas/Jurusan
- 5.6. Bagian Keuangan
- 5.7. Mahasiswa

6. KETENTUAN UMUM

- 6.1. Prinsip umum kerjasama:
 - 6.1.1. Beasiswa ini untuk mahasiswa INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI
 - 6.1.2. Calon mahasiswa diwajibkan untuk memenuhi persyaratan yang diberlakukan.

- 7.1. Uraian Prosedur Kegiatan
 - 7.1.1. Baca kembali MOU antara instansi pemberi beasiswa dengan IAIN Bukittinggi
 - 7.1.2. Adakan rapat persiapan penerimaan permohonan beasiswa
 - 7.1.3. Buat pengumuman penerimaan beasiswa
 - 7.1.4. Umumkan syarat-syarat pengajuan beasiswa antara lain: Surat ket. tdk mampu dr kelurahan, IPK min 3,00. Duduk di smt III & max smt VII; Surat ket. Aktif Kuliah; Surat berkelakuan baik dan tidak sedang menerima beasiswa dr instansi manapun; Memiliki prestasi di bidang seni, olah raga, dan intelektual di tingkat Kabupaten, Provinsi & Nasional serta mengharumkan & membawa nama baik INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGIa pada tingkat Internasional, Nasional, Propinsi & Kabupaten (Khusus Beasiswa Penghargaan Prestasi Mahasiswa); Khusus utk mahasiswa asing, permohonan beasiswa

langsung diajukan ke Subbag Kesejahteraan Mahasiswa

- 7.1.5. Terima berkas pengajuan beasiswa
- 7.1.6. Validasi Data pengajuan beasiswa
- 7.1.7. Rapatkan untuk penetapan distribusi beasiswa sesuai ketentuan
- 7.1.8. Buatkan surat dan kirimkan ke instansi pemberi nama-nama penerima beasisw
- 7.1.9. Arsipkan

7.2. Bagan Alir / Flowchart

		Pelaksana				Mutu Baku	l
No	Kegiatan	Rektor/ Warek III	Kag. Kemaha siswaan	Fakultas	Syarat/ Perleng kapan	Waktu	Output
1	Rektor disposisi surat ke warek III, warek III disposisi ke bag. kemahasiswaan						
2	Bag. Kemahasiswaan memberitahu adanya beasiswa kepada fakultas					10 menit	Berkas permohon an beasiswa
3	Fakultas memberikan pengumuman kepada mahasiswa						
4	Mahasiswa mengajukan permohonan secara tertulis ke fakultas		•				
5	Mengumpulkan dan menyeleksi berkas permohonan beasiswa	<	Ya/ Tidak			10 menit	Berkas permohon an beasiswa
6	Memverifikasi calon penerima					20 menit	Calon penerima beasiswa
7	Menetapakan mahasiswa yang menerima beasiswa					1 hari	Daftar penerima beasiswa
8	Rektor menerbitkan SK penetapan beasiswa	T					
9	Menerima beasiswa (Pencairan)					20 hari	Beasiswa diterima mahasis wa

8. DOKUMEN/ARSIP TERKAIT

- 8.1. Surat dan MOU dari Bank Indonesia
- 8.2. Surat dari bagian kemahasiswaan ke fakultas
- 8.3. Surat pengajuan dari fakultas

- 8.4. Formulir biodata penerima beasiswa
- 8.5. Surat keterangan tidak mampu
- 8.6. Surat keterangan aktif kuliah
- 8.7. IPK, KTM, KTP dan foto penerima
- 8.8. Berkas pengajuan beasiswa dari IAIN
- 8.9. Surat pertanggungjawaban beasiswa



	Г
Kode	IN.26/SPMI/07/02/2018
Tanggal Revisi	15 Januari 2018
Tanggal Berlaku	7 Februari 2018
Revisi	Ke-1
Disahkan oleh	Rektor

SOP PENYUSUNAN ANGGARAN

Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
1. 2.	1.
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
1.	
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan
_	
1.	Arsip

1. TUJUAN

SOP ini bertujuan untuk menjelaskan proses penyusunan anggaran pada IAIN Bukittinggi

2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup SOP penyusunan anggaran meliputi :

- 2.1. Jenis anggaran
- 2.2. Waktu penyusunan anggaran
- 2.3. Proses penyusunan anggaran
- 2.4. Unit yang terlibat
- 2.5. Rencana anggaran Institut

3. DEFINISI

Anggaran adalah rencana pembiayaan kegiatan dalam satu tahun program yang dikuantifikasikan dalam bentuk rupiah.

4. PENGGUNA

Pengguna SOP penyusunan anggaran ini adalah :

- 4.1. Rektor
- 4.2. Wakil Rektor
- 4.3. Kepala Biro
- 4.4. Kepala bagian
- 4.5. Kasubbag
- 4.6. Dekan
- 4.7. Wakil Dekan
- 4.8. Ketua jurusan dan program studi
- 4.9. PUMK
- 4.10. Unit-unit organisasi lainnya

5. JENIS DAN PROSEDUR PENYUSUNAN ANGGARAN

- 5.1. Jenis Anggaran
 - 5.1.1. Anggaran di IAIN bersumber dari APBN (pemerintah) dan non-APBN (masyarakat/lembaga donor);
 - 5.1.2. Anggaran dari APBN adalah dana yang diperoleh dari Negara dalam bentuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang memuat kegiatan Kepemerintahan dan Pengembangan Tugas Pokok Perguruan Tinggi.
 - 5.1.3. Anggaran non-APBN adalah dana yang diperoleh dari pungutan, hibah dan sumbangan yang berasal dari masyarakat dan atau pihak ketiga yang sifatnya mengikat maupun tidak mengikat;
- 5.2. Waktu dan Prosedur Penyusunan Kegiatan dan Anggaran
 - 5.2.1. Penyusunan kegiatan dan anggaran untuk tahun berikutnya dimulai dari tahun anggaran berjalan sampai keluarnya dokumen anggaran:
 - 5.2.2. Penyusunan Anggaran harus mengacu pada Rencana Strategis Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi
 - 5.2.3. Penyusunan kegiatan dan anggaran melibatkan unit kerja di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi;
 - 5.2.4. Anggaran diajukan unit kerja di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi dengan melampirkan Term of Reference (TOR) dan Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Lembaga (RKAKL) serta realisasi anggaran tahun sebelumnya jika kegiatan itu yang berkelanjutan:
 - 5.2.5. Bagian perencanaan mengkompilasi seluruh usulan kegiatan dan anggaran menjadi satu dokumen lengkap;
 - 5.2.6. Bagian perencanaan menelaah kelayakan usulan kegiatan dan anggaran dari unit kerja di lingkungan IAIN Bukitinggi dengan mengacu pada Rencana Strategis Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi
 - 5.2.7. Rencana kegiatan dan anggaran dibahas di tingkat Institut dengan melibatkan unit kerja di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.
 - 5.2.8. Dokumen lengkap kegiatan dan anggaran diajukan kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Administrasi dan Umum untuk disahkan

- sebagai kegiatan dan anggaran tahun berikutnya setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Anggaran (DJA)Pusat.
- 5.2.9. Revisi anggaran dilakukan jika terjadi' perubahan yang mendasar terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah tertuang dalam dokumen anggaran dan dilakukan sepanjang masih dalam lingkup kegiatan-kegiatan pokok perguruan tinggi;

6. REFERENSI

- 6.1. Organisasi Tata Laksana Kerja Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi IAIN Bukittinggi, PMA Nomor 12 tahun 2015
- 6.2. Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 2010, tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
- 6.3. Peraturan Menteri Keuangan nomor 71/PMK.02/2013, tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya dan Indeksasi dalam Penyusunan RKAKL

7. ALUR KERJA / FLOWCHART

					Pela	ksana			Mu	ıtu Baku	
No	Kegiatan	Petugas Keuangan		Petugas Keuangan		Petugas Keuangan		Syarat/ Perleng kapan	Waktu	Out put	
1	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran		• •	<u> </u>]					
2	Pra Konsultasi Perencanaan Minggu ke II Januari										
3	Usulan Pagu Indikatif Minggu ke III-IV' Pebruari										
4	APBN-P Bulan Pebruari										
5	Pagu Indikatif Bulan April										
6	Optimalisasi Pagu indikatif Minggu ke I - III Mei					1					
7	Pagu Sementara Minggu ke I - III Juni										
8	Pagu Definitif September - Oktober										
9	Optimalisasi Pagu sementara Minggu I -11 juli										



Kode	IN.26/SPMI/07/02/2018
Tanggal Revisi	15 Januari 2018
Tanggal Berlaku	7 Februari 2018
Revisi	Ke-1
Disahkan oleh	Rektor

SOP PERSETUJUAN PENCAIRAN DANA KEGIATAN UKM

Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
1.	1.
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
1.	
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan
1.	Arsip

1. TUJUAN

Prosedur ini bertujuan sebagai panduan dalam pemberian persetujuan terhadap pencairan dana bagi kegiatan UKM di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

2. RUANG LINGKUP

- 2.1. Layanan Pengajuan Proposal di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.
- 2.2. Fungsi-fungsi terkait

3. REFERENSI

- 3.1. Pedoman Mutu
- 3.2. Pedoman Pembinaan dan Layanan Bidang Kemahasiswaa
- 3.3. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

- 3.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3.5. Peraturan menteri Agama RI No 12 Tahun 2015 tentang Organisasidan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi
- 3.6. SK Menteri Agama RI No. ... Tahun tentang Statuta IAIN Bukittinggi
- 3.7. SK Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI No. Dj/253/2007 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Agama Islam;
- 3.8. SK Direktur Jenderal pendidikan Islam Departemen Agama RI No. Dj/255/2007 tentang Tata Tertib Mahasiswa Perguuruan Tinggi Agama Islam:
- 3.9. SK Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi No. ... Tahun tentang Kode Etik Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

4. DEFINISI

SPJ: Surat Pertanggungjawaban UKM: Unit Kegiatan Mahasiswa

5. PENGGUNA

- 5.1. UKK/UKM
- 5.2. Kasubbag Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama
- 5.3. Kabag Akademik dan Kemahasiswaan
- 5.4. Kepala Biro AUAK
- 5.5. Pembantu Rektor III Bidang Kemahasiswaan

6. KETENTUAN UMUM

6.1. Prinsip umum kerjasama: Penggunaan anggaran harus sesuai dengan rencana anggaran yang disetujui

- 7.1. Uraian Prosedur Kegiatan
 - 7.1.1. Ajukan proposal kegiatan mahasiswa
 - 7.1.2. Periksa proposal kegiatan mahasiswa
 - 7.1.3. Ajukan proposal ke WR III
 - 7.1.4. Periksa ketersediaan anggaran kegiatan mahasiswa
 - 7.1.5. Buatkan persetujuan pembiayaan kegiatan mahasiswa
 - 7.1.6. Ajukan persetujuan pembiayaan ke keuangan IAIN
 - 7.1.7. Selesai kegiatan buat laporan keuangan

7.2. Bagan Alir / Flowchart / Prosedur Kegiatan

			Pelaksana		Mutu Baku			
No	Kegiatan	UKM	Kasubag Adm	Warek III	Syarat/ Perleng kapan	Waktu	Out put	
1	Mulai							
2	Mengajukan proposal rencana kegiatan						Propoosal rencana kegiatan	
3	Persetujuan proposal rencan kegiatan					1 hari	Propoosal rencana kegiatan yang telah diparaf	
4	Persetujuan Warek Bidang Akademik	,				1 hari	Proposal yang sudah duparaf oleh warek I	
5	Memberikan surat persetujuan pencairan dana					30 menit	Surat persetujuan pencairan dana	
6	Mengajukan pencairan dana ke bagian keuangan					1 hari	Bukti pencairan dana	
7	Melaksanakan kegiatan						Laporan kegiatan	
8	Melaporkan hasil kegiatan kepada Kasubbag Pengembangan Kemahasiswaan dan Kabag. Keuangan					3 hari		

8. DOKUMEN/ARSIP TERKAIT

- 8.1.1. Proposal Rencana Kegiatan
- 8.1.2. Form Surat Persetujuan Pencairan Dana
- 8.1.3. Surat Persetujuan Pencairan Dana



SUBBAG KEUANGAN DAN BMN

Kode	IN.26/SPMI/07/02/2018
Tanggal Revisi	15 Januari 2018
Tanggal Berlaku	7 Februari 2018
Revisi	Ke-1
Disahkan oleh	Rektor

SOP PENCAIRAN ANGGARAN

Da	asar Hukum:	Kualifikasi Pelaksanaan:
 2. 3. 	Negara;	 Menguasi Akuntansi dan Manajemen pengelolaan keuangan Menguasai kegiatan perbendaharaan (pernah ikut diklat kebendaharaan) Pernah mengikuti diklat PPAKP
K	eterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
1. 2. 3.	SOP Pencairan anggaran GU SOP Pencairan LS SOP Pengelolaah Keuangan	Meja, Kursi, Komputer, Brankas, Sarana Transportasi, ATK, Telepon, Kalkulator, Flasdisk
Pe	eringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
1. 2. 3. 4. 5.	Pencairan anggaran harus sesuai DIPA yang telah ditetapkan dan sesuai dengan PO Operasional; Harus melalui KPPN yang telah ditentukan; Tidak melebihi nilai dari ketentuan pagu yang ditetapkan; SPM harus ditandatangani dan di paraf oleh pejabat yang berwenang; Pencairan harus melalui rekening yang telah disetujui	 SPM; SP2D; BKU; Buku-buku pembantu

			Pelak	sana		Mutu Baku		
No	Kegiatan	PPABP	Bend. Pengel	Penguji Tagihan	PPK/ KBA	Syarat/ Perleng kapan	Waktu	Output
1	Menerima berkas dokomen kepegawaian		rongo	ragillar	11371	Dokumen Kepegawaian (SK, KGB, impassing, dll)	5 menit	Dokumen Kepegawaian (SK, KGB, impassing, dll)
2	Melakukan verivikasi dokumen		•			Dokumen Kepegawaian (SK, KGB, impassing, dll)	10 menit	Dokumen kepegawaian yang sesuai
3	Membuat daftar gaji induk/kekurangan gaji/gaji susulan, SSP, SPP, SPTJM					Dokumen Kepegawaian (SK, KGB, Impassing, dll) Aplikasi GPP	2 jam	Daftar gaji induk/ kekurangan gaji/gaji susulan, SSP, SPP, SPTJM
4	Memeriksa daftar gaji induk/kekurangan gaji/ gaji susulan, SSP, SPP, SPTJM					Daftar gaji induk/kekurangan gaji/ gaji susulan, SSP, SPP, SPTJM, aplikasi GPP	15 menit	Daftar gaji induk/kekuran gan gaji/ gaji susulan, SSP, SPP, SPTJM, yang sesuai
5	Pemarafan dan penandatanga daftar gaji induk/kekurangan g gaji susulan, SSP, SPP, SPTJM					Daftar gaji induk/kekurangan gaji/ gaji susulan, SSP, SPP, SPTJM, yang sesuai		
6	Pemarafan dan penandatanga daftar gaji induk/kekurangan g gaji susulan, SSP, SPP, SPTJM					Daftar gaji induk/kekurangan gaji/ gaji susulan, SSP, SPP, SPTJM, yang sesuai		
7	Pemarafan dan penandatanga daftar gaji induk/kekurangan g gaji susulan, SSP, SPP, SPTJM					Daftar gaji induk/kekurangan gaji/ gaji susulan, SSP, SPP, SPTJM, yang sesuai	15 Menit	Daftar perhitungan SSP, SPP, SPTJ daftar gaji induk/ kekurangan gaji/gaji susulan, SSP, SPP,
8	Pemarafan dan penandatanganan daftar gaji induk/kekurangan gaji/ gaji susulan, SSP, SPP, SPTJM				\bigcirc	Daftar gaji induk/kekurangan gaji/ gaji susulan, SSP, SPP, SPTJM, yang sesuai		SPM
9	Menginput SPM					Daftar gaji induk/kekurangan gaji/ gaji susulan, SSP, SPP, SPTJM, Aplikasi SPM		SPM
10	pemarafan dan penandatanganan SPM					SPM		SPM

11	pemarafan dan penandatanganan SPM			SPM	SPM
12	pemarafan dan penandatanganan SPM			SPM	SPM
13	pemarafan dan penandatanganan SPM		\Diamond	SPM	SPM
14	Menyerahkan SPM ke KPPN			SPM	Ekspedisi
15	Menerbitkan SP2D dari KPPN				Dana telah cair



SUBBAG KEUANGAN DAN BMN

Nomor SOP	In.26/Perenc-
	Keu/SOP/004
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	

SOP PENCAIRAN UANG MAKAN

Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksanaan:
 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; PP No. 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga; PMK Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN; PMK Nomor 170/PMK.05/2010 tentang penyelesaian tagihan Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Satuan Kerja; PMK Nomor 110MK.05/2012 tentang pemberian dan tata cara pembayaran uang makan bagi pegawai negeri sipil. 	 Menguasi Akuntansi dan Manajemen pengelolaan keuangan Menguasai kegiatan perbendaharaan (pernah ikut diklat kebendaharaan) Pernah mengikuti diklat PPAKP Pernah dan menguasi diklat perpajakan Pernah mengikuti diklat SAI dan menguasi SAI MenguasaiAplikasi GPP
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
 SOP Pencairan anggaran SOP Pengelolaah Keuangan 	Meja, Kursi, Komputer, Brankas, Sarana Transportasi, ATK, Telepon, Kalkulator, Flasdisk
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
 Pencairan anggaran harus sesuai DIPA yang telah ditetapkan dan sesuai dengan PO Operasional; Harus melalui KPPN yang telah ditentukan; Tidak melebihi nilai dari ketentuan pagu yang ditetapkan; SPM harus ditandatangani dan diparaf oleh pejabat yang berwenang; Pencairan dana langsung pada Pihak Para Pegawai; Transaksi Gaji yang berlangsung harus dipotong pajak sesuai ketentuan yang berlaku. 	1. SPM; 2. SP2D; 3. BKU; 4. Buku Pembantu LS; 5. Apliasi GPP; 6. SPP; 7. SSP;

		Pelaksana			Mutu Baku			
No	Kegiatan	PPABP	Bend. Pengel	Penguji Tagihan	PPK/ KBA	Syarat/ Perleng kapan	Waktu	Output
1	Menerima rekap absensi pegawai	\bigcirc				Rekap absen dari kepegawaian		
2	Memverifikasi Rekap Absen					Rekap absen dari kepegawaian	30 Menit	Rekap absen yang sesuai
3	Membuat Daftar Perhitungan Uang Makan, SSP, SPP						2 jam	Daftar Perhitungan Pembayaran Uang Makan, SSP, SPP
4	Memeriksa Daftar Perhitungan Uang Makan, SSP, SPP						30 menit	Daftar Perhitungan Uang Makan, SSP, SPP yang sesuai
5	Memaraf dan menandatangani Daftar Perhitungan Uang Mak SSP, SPP		•			Daftar Perhitungan Uang Makan, SSP, SPP, SPTJM	10 menit	Daftar Perhitungan Uang makan, SSP, SPP yang telah ditandatangani
6	Memaraf dan menandatangani Daftar Perhitungan Uang Mak SSP, SPP					Daftar Perhitungan Uang Makan, SSP, SPP, SPTJM	20 menit	Daftar Perhitungan Uang makan, SSP, SPP yang telah ditandatangani
7	Memaraf dan menandatangani Daftar Perhitungan Uang Mak SSP, SPP			_		Daftar Perhitungan Uang Makan, SSP, SPP, SPTJM	30 menit	Daftar Perhitungan Uang makan, SSP, SPP yang telah ditandatangani
8	Menginput SPM					Daftar Perhitungan Uang Makan, SSP, SPP, SPTJM	30 menit	SPM
9	Memaraf dan menandatangani SPM					SPM	15 menit	SPM yang telah ditandatangani
10	Memaraf dan menandatangani SPM					SPM	15 menit	SPM yang telah ditandatangani
11	Mengirim SPM ke KPPN					SPM, Daftar Perhitungan uang makan, SSP, , KIP	2 jam	Surat keterangan telah diagendakan
12	Menerbitkan SP2D					SPM dan Lampiran	2 hari	SPM dan Lampiran yang benar

KEMENTERIAN AGAMA	Nomor SOP	In.26/Perenc- Keu/SOP/004
-------------------	-----------	------------------------------

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI	Tanggal Pembuatan
IAIN BUKITTINGGI	Tanggal Revisi
SUBBAG KEUANGAN DAN BMN	Tanggal Efektif
	Disahkan Oleh

SOP PENCAIRAN TUNJANGAN PROFESI

Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksanaan:		
 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; PP No. 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga; PMK Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN; PMK Nomor 170/PMK.05/2010 tentang penyelesaian tagihan Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Satuan Kerja; PMK Nomor 110MK.05/2012 tentang pemberian dan tata cara pembayaran uang makan bagi pegawai negeri sipil. 	 Menguasi Akuntansi dan Manajemen pengelolaan keuangan Menguasai kegiatan perbendaharaan (pernah ikut diklat kebendaharaan) Pernah mengikuti diklat PPAKP Pernah dan menguasi diklat perpajakan Pernah mengikuti diklat SAI dan menguasi SAI MenguasaiAplikasi GPP 		
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:		
 SOP Pencairan anggaran SOP Pengelolaah Keuangan 	Meja, Kursi, Komputer, Brankas, Sarana Transportasi, ATK, Telepon, Kalkulator, Flasdisk		
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:		
 Pencairan anggaran harus sesuai DIPA yang telah ditetapkan dan sesuai dengan PO Operasional; Harus melalui KPPN yang telah ditentukan; Tidak melebihi nilai dari ketentuan pagu yang ditetapkan; SPM harus ditandatangani dan diparaf oleh pejabat yang berwenang; Pencairan dana langsung pada Pihak Para Pegawai; Transaksi Gaji yang berlangsung harus dipotong pajak sesuai ketentuan yang berlaku. 	 SPM; SP2D; BKU; Buku Pembantu LS; Apliasi GPP; SPP; SSP; 		

		Pelaksana			Mutu Baku				
No	Kegiatan	PPABP	Bend. Pengel	Penguji Tagihan	PPK/ KBA	Syarat/ Perleng kapan	Waktu	Output	
1	Menerima SK tunjangan profesi	\bigcirc				SK Penerima Tunjangan Profesi	10 menit	SK Tunjangan profesi diterima	
2	Membuat Daftar Perhitungan Pembayaran Tunjangan Profesi, SPP, SSP					SK Penerima Tunjangan Profesi	2 jam	Daftar Perhitungan Pembayaran Tunjangan Profesi, SPP, SSP	
3	Memeriksa Daftar Perhitungan Pembayaran Tunjangan Profesi, SPP, SSP					SK Penerimaan Tunjangan Profesi, Daftar Perhitungan Pembayaran Tunjangan Profesi, SPP, SSP	1 jam	Daftar Perhitungan Pembayaran Tunjangan Profesi, SPP, SSP	
4	Memaraf dan Menandatanganani Daftar Perhitungan Pembayaran Tunjangan Profesi, SPP, SSP					Daftar Perhitungan Pembayaran Tunjangan Profesi, SPP, SSP	10 menit	Daftar perhitungan pembayaran tunjangan profesi, SSP yang telah ditandatangani	
5	Memaraf dan menandatangani Daftar Perhitungan Pembayaran Tunjangan Profesi, SPP, SSP			-		Daftar perhitungan pembayaran tunjangan profesi, SSP, aplikasi SPM	30 menit	Daftar perhitungan pembayaran tunjangan profesi, SSP yang telah ditandatangani	
6	Menginput SPM					Daftar perhitungan pembayaran tunjangan profesi, SSP, aplikasi SPM	30 menit	SSP dan SPM	
7	Memaraf dan Menandatanganani SPM					SSP dan SPM	15 menit	SSP dan SPM yang telah ditandatangani	
8	Memaraf dan Menandatanganani SPM				\Diamond	SSP dan SPM	15 menit	SSP dan SPM yang telah ditandatangani	
9	Mengirim SPM ke KPPN					SPM, Daftar Perhitungan Pembayaran Tunjangan Profesi, SPP, KIP		buku ekspedisi	
10	Menerima penerbitan SP2D dari KPPN								



Kode	IN.26/SPMI/07/02/2018
Tanggal Revisi	15 Januari 2018
Tanggal Berlaku	7 Februari 2018
Revisi	Ke-1
Disahkan oleh	Rektor

SOP PENCAIRAN ANGGARAN KEGIATAN

Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
3.	1.
4.	
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
3.	
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan
3.	Arsip

1. TUJUAN

Prosedur ini dibuat untuk memastikan kelancaran proses pencairan anggaran kegiatan yang diajukan oleh Fakultas, Unit dan Lembaga di lingkungan IAIN Bukittinggi.

2. RUANG LINGKUP

Berlaku mulai tahap pengusulan yang dilakukan oleh Fakultas, Pasca Sarjana, Unit dan Lembaga, pemrosesan yang dilakukan oleh Bagian Keuangan dan BMN sampai dengan pengusulan pencairan dana ke KPPN.

3. DEFINISI

3.1. Kemenag: Kementrian Agama

3.2. Warek : Wakil Rektor

3.3. Kasubbag : Kepala Sub Bagian3.4. Kabag : Kepala Bagian

3.5. Kabiro : Kepala Biro 3.6. PA : Bendahara

4. REFERENSI

4.1. Statuta IAIN Bukittinggi

4.2. Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2000

5. GARIS BESAR PROSEDUR

Fakultas/Unit/ : 1. Mengajukan Proposal Kegiatan Lembaga

2. Membuat jadwal kegiatan

Kasubbag : 1. Menerima Proposal Kegiatan yang telah di setujul

Keuangan 2. Menyusun rencana pencairan anggaran

Kabag : 1. Mengecek Proposal yang masuk Dan Keuangan

Perencanaan 2. Mencocokkan anggaran pada DIPA dengan Ajuan Proposal

Kabiro AUAK dan : Mengecek kembali usulan pada proposal Yang Terkait

WR Rektor : Mengetahui dan mengkoordinasikan dengan WR terkait

6. KETENTUAN UMUM

Pencairan anggaran harus sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Agama RI dan kebijakan dari Pimpinan Lembaga.

- 7.1. Uraian Detail Prosedur
 - 7.1.1. Sesuai dengan jadwal yang telah dibuat oleh Fakultas, Pasca Sarjana, Unit dan Lembaga di Lingkungan IAIN Bukittinggi maka oleh Fakultas, Pasca Sarjana, Unit dan Lembaga menyampaikan proposal kegiatan ke bagian Umum;
 - 7.1.2. Proposal diproses oleh bagian umum sampai dimeja Biro maka selanjutnya Kepala Biro melanjutkannya ke meja Rektor untuk diketahui dan di disposisi oleh Rektor ke WR terkait.
 - 7.1.3. Wakil Rektor terkait menyetujui atau menolak proposal kegiatan yang bersangkutan.
 - 7.1.4. Dari Wakil Rektor terkait menurunkannya ke Ka Biro AUAK untuk diteruskan ke Kabag Perencanaan dan Keuangan.
 - 7.1.5. Kabag Perencanaan dan Keuangan menerima proposal disposisi keputusan diterima atau ditolaknya proposal kegiatan tersebut. Apabila ditolak maka disampaikan ke Fakultas, Pasca Sarjana, Unit dan Lembaga terkait.
 - 7.1.6. Apabila Proposal telah diterima disposisinya maka diberikan langsung ke Staf PPK untuk dilanjutkan koordinasi ke Fakultas, Pasca Sarjana, Unit dan Lembaga.
 - 7.1.7. Untuk Pencairan Anggaran kegiatan lakukan oleh Panitia atau Pelaksana dengan memberikan Laporan Hasil Kegiatan kepada Sub Bagian Keuangan dan BMN.



Kode	IN.26/SPMI/07/02/2018
Tanggal Revisi	15 Januari 2018
Tanggal Berlaku	7 Februari 2018
Revisi	Ke-1
Disahkan oleh	Rektor

SOP PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN

Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
5. 6.	1.
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan
4.	Arsip

1. TUJUAN

Prosedur ini dibuat untuk memastikan kelancaran proses Penyusunan progam dan anggaran bagi Fakultas, Unit dan Lembaga di lingkungan IAIN Bukittinggi oleh Bagian Perencanaan dan Keuangan.

2. RUANG LINGKUP

Berlaku mulai tahap pengusulan yang dilakukan oleh Fakultas,Pasca Sarjana, Unit dan Lembaga, pemrosesan yang dilakukan oleh Bagian Perencanaan sampai dengan pengusulan di Bagian Perencanaan Kementerian Agama RI Jakarta.

3. DEFINISI

3.1. Kemenag : Kementrian Agama

3.2. Warek : Wakil Rektor

3.3. Kasubbag : Kepala Sub Bagian

3.4. Kabag : Kepala Bagian

3.5. Kabiro : Kepala Biro

4. REFERENSI

4.1. Statuta IAIN Bukittinggi

4.2. Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2000

5. GARIS BESAR PROSEDUR

Fakultas/Unit/ : 1. Mengajukan Usulan Rancangan Rencana Lembaga Kerja

selama satu tahun

2. Menentukan prioritas rencana kegiatan

Kasubbag Perencanaan : 1. Menghimpun Rencana Usulan

2. Menyusun Kembali Usulan dari Fakultas

Kabag Perencanaan : 1. Mengecek Kembali usulan yang dibuat

2. Menentukan Prioritas, sesuai dengan usulan Lembaga

Kabiro AUAK dan WR II : Mengecek kembali usulan

Rektor : Mengecek dan menandatangani usulan program kegiatan selama

satu tahun

6. KETENTUAN UMUM

Penyusunan program kegian ini dilakukan pada awal tahun anggaran sebeumnya pada IAIN Bukittinggi

7. PROSEDUR KEGIATAN

7.1. Uraian Detail Prosedur

- 7.1.1. Sesuai dengan waktu yang telah ditentukan Fakultas/Unit dan Lembaga di Lingkungan IAIN Bukittinggi menyampaikan usulan Rancangan Rencana Kerja Tahun berikutnya kepada Sub Bagian Perencanaan minggu II bulan Januari tahun anggaran sebelumnya sesuai dengan format yang telah diberikan;
- 7.1.2. Kasubbag Perencanaan menghimpun rancangan usulan dari Fakultas/Unit dan Lembaga pada minggu I bulan Februari tahun anggaran sebelumnya, dengan memperhatikan prosedur yang ada, maka akan diproses ke langkah berikutnya, dan apabila tidak memenuhi persyaratan, maka usulan itu dikembalikan kepada Fakultas/Unit dan Lembaga;
- 7.1.3. Kasubbag Perencanaan menyusun kembali usulan Rencana Kegiatan tahun berikutnya setelah mencapatkan pagu indikatif pada minggu III bulan april tahun anggaran sebelumnya;
- 7.1.4. Kasubbag Perencanaan menyampaikan Rencana Kegiatan kepada Kabag Perencanaan dan Keuangan untuk dikoreksi dan dikomunikasikan dengan

- pihak terkait. Apabila benar, maka rencana kegiatan akan langsung diproses, apabila ada pembenaran, maka akan dikembalikan kepada Kasubbag Perencanaan;
- 7.1.5. Kabag Perencanaan dan Keuangan menyampaikan Rencana Kegiatan kepada Kabiro AU untuk mengecek kembali, apabila benar maka langsung diproses, apabila ada kesalahan maka dikembalikan kepada Kabag Perencanaan dan Keuangan untuk dibenarkan;
- 7.1.6. Apabila Rencana Kegiatan sudah benar, maka disampaikan kepada WR II untuk dikoreksi kembali, apabila benar maka langsung diproses, apabila ada kesalahan maka dikembalikan kepada Kabag Perencanaan dan Keuangan untuk dibenarkan;
- 7.1.7. Apabila Rencana Kegiatan sudah benar, maka disampaikan kepada Rektor untuk mendapatkan persetujuan dan ditandatangani untuk dikirimkan ke Kemenag Pusat.

7.2. Bagan Alir / Flowchart

			elaksana			,		Mutu Baku			
No	Kegiatan	Unit/ Faku Itas	Sub bag. Peren canaan	Kasu bag Peren canaan	Kab bag Peren &Keu	Ka biro AUAK	Warek II	Rektor	Syarat/ Perleng kapan	Waktu	Out put
1	Sesuai dengan waktu yang telah ditentukan fakultas/unit/lembaga di lingkungan IAIN Bukittinggi menyampaikan usulan rancangan rencana kerja tahun berikutnya kepada sub bagian perencanaan									Minggu II Bulan Januari Tahun anggaran sebelumnya	Usulan program dan kegiatan
2	Kasubbag perencanaan menghimpunrancang an usulan dari fakultas/unit/lembaga									Minggu I Februari tahun anggaran sebelumnya	Himpunar rancangan usulan program kegiatan
3	Kasubbag perencanaan menyusun kembali usulan rencana kegiatan tahun berikutnya setelah mendapat pagu indikatif									Minggu III bulan April tahun anggaran sebelumnya	Usulan rencana kegiatan
4	Kasubbag PA menyampaikan rencana kegiatan kepada kabag perencanaan & keuangan untuk dikoreksi dan dikomunikasikan dengan pihak terkait. apabila benar, maka rencana kegiatan akan langsung diproses. apabila ada pembenaran maka akan dikembalikan kepada kasubbag perencanaan										Rencana kegiatan kembali apabila benar akai langsung diproses
5	Kabbag perencanaan & Keuangan menyampaikan rencana kegiatan kepada Kabiro AUAK										Rencana kegiatan
6	Kabiro AUAK mengecek, bila ada kesalahan maka dikembalikan kepada										Rencana kegiatan

	Kabbag perencanaan & Keuangan untuk dibenarkan, bila sudah benar maka disampaikan kepada WR II						
7	WR II mengoreksi kembali. bila benar maka langsung diproses. bila ada kesalahan maka dikembalikan kepada Kabag Perencanaan & Keuangan			\Diamond			Rencana kegiatan
8	Rencana Kegiatan yang sudah benar, maka disampaikan kepada Rektor						Rencana kegiatan
9	Rektor menyetujui dan menanda tangani kemudian rencana kegiatan dikirimkan ke Kemenag Pusat						

8. DOKUMEN / ARSIP TERKAIT

- 8.1. Form TOR
- 8.2. Form RAB
- 8.3. Data dukung lainnya



Kode	IN.26/SPMI/07/02/2018
Tanggal Revisi	15 Januari 2018
Tanggal Berlaku	7 Februari 2018
Revisi	Ke-1
Disahkan oleh	Rektor

SOP PELAPORAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
7.	1.
8.	
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
5.	
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan
5.	Arsip

1. TUJUAN

Prosedur ini dibuat untuk memastikan kelancaran proses pelaporan realisasi program dan kegiatan di lingkungan IAIN Bukittinggi per 3 bulan sekali.

2. RUANG LINGKUP

Berlaku mulai tahap penyampaian laporan realisasi program dari Kabag Keuangan, pemrosesan sampai dengan penyampaian laporan kepada Bappenas dan Bagian Perencanaan Dirjen Pendis Kemenag RI.

3. DEFINISI

3.1. Kemenag : Kementerian Agama3.2. Kasubbag : Kepala Sub Bagian3.3. Kabag : Kepala Bagian3.4. Kabiro : Kepala Biro

4. REFERENSI

- 4.1. Statuta IAIN Bukittinggi
- 4.2. Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2000

9. PENANGGUNG JAWAB

a. Kabag Perencanaan

- : 1. Menerima laporan realisasi program dan anggaran dari sub bagian Keuangan
 - 2. Merekomendasikan kepada Kasubbag Perencanaan untuk disusun laporan Triwulan
 - 3. Mengoreksi kembali laporan yang dibuat oleh

4. Kasubbag Perencanaan

b. Kasubbag Perencanaan : Menyusun laporan triwulan berdasarkan laporan realisasi anggaran dari sub bagian keuangan

c. Kabiro AUAK dan WR II : 1. Mengecek kembali Pelaporan

 Mengesahkan pelaporan triwulan atas nama Rektor untuk dikirimka ke Kemenag Pusat dan Rappenas

Bappenas

d. Rektor : Mengecek dan menandatangani pelaporan triwulan

e. Kemenag dan Bappenas

: Menerima Laporan

10. KETENTUAN UMUM

Pelaporan ini hanya difokuskan kepada realisasi program dan kegiatan sesuai dengan DIPA yang telah disahkan.

- a. Uraian Prosedur Kegiatan
 - Setiap akhir bulan Maret, Juni, September dan Desember. Sub bagian keuangan menyampaikan rekapitulasi penyerapan program dan kegiatan kepada Kabag perencanaan dan Keuangan
 - ii. Kabag Perencanaan dan Keuangan menerima dan merekomendasikan kepada Kasubbag Perencana untuk membuat laporan triwulan
 - iii. Kasubbag perencanaan menyusun laporan Triwulan, di awal bulan April, Juli, September, Januari tahun berikutnya.
 - iv. Kabag perencanaan dan Keuangan mengecek kembali apabila benar maka dilanjutkan, dan apabila salah maka akan dikembalikan kepada Kasubbag Perencanaan
 - v. Laporan yang sudah disahkan oleh Kabag Perencanaan dan Keuangan, dilampaikan kepada Kabiro AUAK dan WR untuk dicek dan diparaf untuk selanjutnya di tandatangani oleh Rektor dan dikirimkan ke Kemenag Pusat dan Bappenas.

b. Bagan Alir / Flowchart

	Dagail 7 iii 7 1 loworlai		Pelaksa	na	Mutu Baku			
No	Aktivitas	Kasub bag Keua ngan	Kabag Peren canaan & Keua ngan	Kasub bag Peren canaan	Kabiro AUAK, WR II dan Rektor	Syarat/ Perleng kapan	Waktu	Output
1	Kasubbag keuangan menyampaikan rekapitulasi penyerapan program dan kegiatan kepada Kabag perencanaan dan Keu pada setiap akhir bulan maret, juni, september dan desember.					Lap. realisasi anggaran		Rekap penyera pan program dan kegiatan
2	Kabag Perencanaan dan Keu menerima dan mereko- mendasikan kepada Kasubbag Perencanaan untuk membuat laporan triwulan							Reko mendasi
3	Kasubbag Perencanaan menyu- sun laporan Triwulan,			•			Awal bulan April, Juli, Septem ber, Januari tahun berikutny a	Laporan triwulan
4	Kabag perencanaan dan Keu mengecek kembali apabila benar maka dilanjutkan, dan apabila salah maka akan dikembalikan kepada Kasubbag Perencanaan							laporan
5	Laporan yang sudah disahkan oleh Kabag Perencanaan, disam- paikan kepada Kabiro AUAK dan WR II untuk dicek dan diparaf dan ditandatangani oleh Rektor selanjutnya dikirimkan ke Pusat				•			laporan

12. DOKUMEN/ARSIP TERKAIT

- a. Form Realisasi program dan kegiatan
- b. Form Pelaporan



Kode	IN.26/SPMI/07/02/2018
Tanggal Revisi	15 Januari 2018
Tanggal Berlaku	7 Februari 2018
Revisi	Ke-1
Disahkan oleh	Rektor

SOP REVISI ANGGARAN

Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
13.	1.
14.	
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
6.	
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan
6.	Arsip

1. TUJUAN

Prosedur ini dibuat untuk menyesuaikan anggaran dengan kebutuhan anggaran tahun berjalan.

2. RUANG LINGKUP

Berlaku dari awal sampai akhir tahun anggaran dengan memperhatikan kebutuhan institusi atau lembaga

3. DEFINISI

3.1. Kemenag : Kementerian Agama
3.2. Kasubbag : Kepala Sub Bagian
3.3. Kabag : Kepala Bagian
3.4. Kabiro : Kepala Biro

4. REFERENSI

4.1. Statuta IAIN Bukittinggi

4.2. Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2000

5. GARIS BESAR PROSEDUR

5.1. Fakultas/Unit : Mengajukan usulan prubahan anggaran kegiatan

5.2. Kasubbag : Menerima usulan revisi anggaran kegiatan dan

Perencanaan menverifikasi

5.3. Kabag Perencanaan&: Mencek dan mengajukan revisi

Keu

5.4. Kabiro AUAK : Mencek dan mengajukan revisi

5.5. Rektor : Menyetujui dan Mengkoordinasikan dengan Wakil

Rektor terkait

6. KETENTUAN UMUM

Revisi dilaksanakan dengan memperhatikan peraturan revisi anggaran yang dikeluarkan oleh kementerian keuangan..

- 7.1. Uraian Prosedur Kegiatan
 - 7.1.1. Fakultas dan unit mengajukan usulan revisi anggaran kegiatan ke sub bagian perencanaan
 - 7.1.2. Bagian sub perencanaan menerima usulan revisi anggaran kegiatan dari unit/fakultas untuk di rekapitulasi dan di verifikasi ketersediaan anggaran
 - 7.1.3. Sub bagian perencanaan menyerahkan daftar usulan revisi kegiatan yang telah diverifikasi ke Kabag Perencanaan dan Keuangan
 - 7.1.4. Kabag Perencanaan dan Keuangan mencek dan menyerahkan usulan revisi kegiatan ke Kabiro AUAK
 - 7.1.5. Kabiro AUAK mencek dan menyerahkan usulan revisi kegiatan ke Rektor untuk diketahui dan di disposisikan
 - 7.1.6. Rektor mengkoordinasikan usulan revisi kegiatan kepada wakil rektor sesuai dengan bidangnya
 - 7.1.7. Wakil rektor terkait menyetujui perubahan anggaran dan mengusulkan perubahan anggaran ke rektor/KPA
 - 7.1.8. Rektor menyetujui perubahan anggaran dan meyerahkannya ke sub bagian perencanaan untuk di proses secara administrasi